



---

**BPK Perwakilan Banten Serahkan LHP LKPD Tahun 2022  
kepada Pemerintah Kabupaten Lebak**

**Serang, 15 Mei 2023** – Kepala Perwakilan BPK Banten, **Emmy Mutiarini** menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lebak Tahun 2022 kepada Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lebak, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lebak dan Bupati Lebak, Dr. Hj. Iti Octavia Jayabaya, SE., MM. di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Banten, Serang (15/5).

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Banten atas LKPD Kabupaten Lebak Tahun 2022, termasuk implementasi atas rencana aksi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, maka BPK memberikan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** atas LKPD TA 2022 kepada Pemerintah Kabupaten Lebak. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Lebak, dapat kembali mempertahankan opini WTP.

Namun demikian, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai Pemerintah Kabupaten Lebak, BPK masih menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah. Permasalahan-permasalahan yang harus segera ditindaklanjuti antara lain:

1. Kesalahan Penganggaran Belanja Pemeliharaan pada Delapan Perangkat Daerah;
2. Belanja Perjalanan Dinas dalam Rangka Kegiatan Kunjungan Kerja, Studi Banding, Koordinasi, dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Tidak Sesuai Ketentuan;
3. Pelaksanaan Paket Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak pada 17 Paket Pekerjaan Jalan di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, Serta Enam Paket Pekerjaan Gedung Dan Bangunan di Dua Perangkat Daerah; dan
4. Pengelolaan Piutang PBB-P2 dan Piutang Denda PBB P2 pada Badan Pendapatan Daerah Belum Memadai.

Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP dengan memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

Berdasarkan data rekapitulasi pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK per Semester II 2022, Pemerintah Kabupaten Lebak telah menindaklanjuti 828 rekomendasi dari 934 rekomendasi atau 88,65% dari seluruh rekomendasi periode 2005 – 2022. Dengan demikian masih terdapat 106 rekomendasi (11,35%) yang harus menjadi prioritas untuk segera ditindaklanjuti.

Dalam sambutannya Emmy Mutiarini menyampaikan harapannya agar Pimpinan DPRD dapat ikut memantau penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan yang terdapat dalam LHP ini sesuai dengan kewenangannya. “Kami berharap agar hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkap Emmy Mutiarini.